

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN LISTRIK PEDESAAN OLEH DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh : Lilis Julianti

Email : Lilisjulianti233@gmail.com

Pembimbing : Zulkarnaini, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

ABSTRACT

Lilis Julianti, NIM: 1301110154. The Development Program Electric Rural Areas by The Department of Mining and Energy of Rokan Hulu Regency. Teacher Guidance : Zulkarnaini, S.Sos., M.Si

The study was initiated by the low ratio Electrification Development Programmee electric rural areas in Rokan Hulu, it is characterized by many of the villages that have not getting electricity. In addition there is an imbalance between the proposal to electricity the countryside with the parties in the field. The purpose of this research is to figure out how the New Development Program electric rural areas by the Department of Mining and Energy of the Rokan Hulu, and to determine what the factors that affect the New Development Program electric rural areas by the Department of Mining and Energy of the Rokan Hulu.

The research was carried out in the Department of Mining and Energy of the Rokan Hulu. The theory used in New Policy of Van Metter and Van Horn. As Van Metter and Van Horn said that there are six things to note that the implementation of the program can run well and achieve satisfactory results, size and purpose of Policy, Resource, Characteristics of Implementer Agent, Interorganisation Communication and activity of implementer, the Economic Environment, Social and Political Parties. The method used is descriptive approach a qualitative, and the techniques used in the collection of data is interviews, observations and documentation.

This research result indicates that the New Development Program electric rural areas by the Department of Mining and Energy of the Rokan Hulu hasn't been going up, it can be seen from The purpose of a program that has not show fully because there are many rural communities that have not been getting the electricity, and is now the program has just reached ± 60 %. The Program electric rural areas is still hampered by two factors : the limited budget the government and the lack of innovation in harnessing the potential of energy. If a limited budget then it would be hard for implementor to achieve the objectives of the program and innovation in the implementation of the program is still lacking then the success of the program to be getting longer.

Keywords : Implementation, Programme, Electric rural areas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman listrik dianggap sebagai tonggak utama dalam kegiatan masyarakat yang menyangkut produksi, distribusi, penerangan, transportasi, hiburan, sarana prasarana umum, rumah tangga dan lainnya. Listrik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat baik di kota-kota besar maupun kecil termasuk pedesaan, serta listrik mampu menjadikan masyarakat lebih responsif terhadap perubahan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk, kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan dan pembangunan listrik pedesaan

Program pengembangan listrik pedesaan memang sudah berjalan di Kabupaten Rokan Hulu. Namun pelaksanaan program tersebut masih perlu pembenahan-pembenahan pada masa mendatang. Isu strategis yang perlu diperhatikan

bagi pelaksanaan program ini adalah mencakup permasalahan mendasar yang memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun isu atau permasalahan yang strategis dan menjadi fenomena terkait dengan pengembangan listrik pedesaan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu

1. Pembangunan jaringan listrik ke Pedesaan belum sepenuhnya tersentuh oleh jaringan listrik PLN, hal ini ditandai dengan masih terdapatnya 37 desa yang belum tersentuh oleh jaringan listrik.
2. Terjadinya ketidakseimbangan antara usulan listrik yang masuk ke Dinas Pertambangan dan Energi dengan Realisasi Program/Kegiatan.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa hasil/realisasi program listrik Pedesaan belum sesuai dengan indikator/tolak ukur pelaksanaan program maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan

diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian serta dapat memberikan informasi mengenai pengembangan listrik di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

2. Implementasi Kebijakan

1. Pengembangan disiplin ilmu administrasi negara khususnya dibidang kebijakan publik
2. Dapat digunakan sebagai referensi dan rekomendasi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian lanjutan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan dan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.

E. Konsep Teori

1. Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik menurut Santoso dalam Wibawa (2011:2) adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana yang menjelaskan cara-cara mencapai tujuan ataupun suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat kedepan. Disamping itu Wibawa mengemukakan pendapatnya tentang kebijakan publik yaitu setiap keputusan yang dibuat oleh suatu "sistem politik" Negara, Provinsi, Kabupaten dan Desa, atau RT dan RW. Setiap sistem ini membuat kebijakan publik untuk publik masing-masing dan untuk itu sistem tersebut menghimpun serta mengarahkan sumberdaya publik yang bersangkutan.

Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan berbagai kepentingan. Studi implementasi adalah suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Van Metter dan Van Horn sebagaimana yang dikutip oleh Agustino (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian dan adanya hasil kegiatan.

Model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:142) adalah model pendekatan *top-down* yang disebut dengan *A model of the policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel model ini mengandalkan bahwa implementasi berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Dibawah ini terdapat enam variabel menurut Van Metter dan

Van, model pendekatan "*The Policy Implementation Proses*" yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan publik :

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Contohnya sumberdaya manusia, finansial dan waktu. Dalam penelitian ini hal yang terpenting yaitu kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya finansial.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksana.

4) Sikap/Kecenderungan

(*Disposition*) para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolak diri pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh

karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan melainkan kebijakan yang dibentuk adalah kebijakan dari “atas” (*top down*).

- 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi merupakan mekanisme yang sangat ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi diantara pihak yang terlibat maka kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi

- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu dilihat adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan proses implementasi kebijakan, karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3. Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sebuah program dapat dikatakan berhasil atau baik apabila ada manfaatnya atau pengaruh yang positif bagi

masyarakat. Menurut Solihin (2009:71) mengatakan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Disamping itu Abadi dalam Jones (2012:19) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, pemberian tugas, langkah-langkah yang diambil, sumber-sumber yang dimanfaatkan dan elemen –elemen yang diperlukan untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu. Program ini biasanya dijabarkan dan dirincikan dalam sebuah proyek-proyek yang didukung oleh anggaran namun sebaik apapun program tanpa adanya implementasi tidak akan mungkin sasaran atau tujuan yang dikehendaki akan tercapai.

Ada beberapa karakteristik sebuah program diantaranya yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf sebagai pelaku pelaksanaan dari sebuah program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri
3. Program memiliki identitas sendiri yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan dan menceritakan keadaan di lokasi penelitian baik tentang masyarakat, pemerintah, dan lainnya.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah berdasarkan pada pertimbangan bahwa ada fenomena dan kondisi yang harus dikaji sesuai dengan penjelasan latar belakang penelitian.

2. Informan Penelitian

Informan merupakan suatu istilah dalam penelitian kualitatif yaitu orang yang memberikan keterangan kepada peneliti ataupun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui *Key Informan*. Untuk menentukan *Key Informan* maka peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Sugiyono (2012:54) mengemukakan bahwa *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.

Adapun Sumber Data dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Seksi Ketenagalistrikan

- Distamben Kabupaten Rokan Hulu
2. Staf Seksi Ketenagalistrikan Distamben Kabupaten Rokan Hulu
3. Aparatur Desa Penerima Program Listrik Pedesaan
4. Aparatur Desa Tidak Penerima Program Listrik Pedesaan
5. Masyarakat Penerima Program Listrik Pedesaan
6. Masyarakat Tidak Penerima Program Listrik Pedesaan

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sumber datanya adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung contohnya wawancara. Untuk memperoleh data dalam penelitian, peneliti harus mewawancarai para informan atau pihak-pihak yang terkait contohnya pemerintah dan masyarakat.
- b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data hasil olahan atau data sumber kedua seperti, Dokumen Dinas Pertambangan dan Energi yang berkaitan dengan pengembangan listrik pedesaan. Renstra Strategis Dinas Pertambangan dan Energi. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) dan lainnya. Data ini sangat diperlukan untuk memperkuat dan memperjelas tujuan atau hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
Wawancara adalah interaksi yang dilakukan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok yang dilakukan secara langsung berupa tanya jawab guna mencapai tujuan seseorang/sekelompok orang.
- b. Observasi
Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada objek yang akan diteliti jauh sebelum penelitian dilakukan maupun saat penelitian sedang dilakukan. Caranya yaitu dengan melihat secara langsung dan mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui dokumentasi penelitian, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara menganalisa informasi dan data yang di ketahui, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang diperoleh melalui pengamatan maupun wawancara secara langsung dengan informan penelitian. Keseluruhan informasi dan data yang diperoleh dikumpulkan, dipelajari, dianalisa dan disimpulkan yang nantinya mampu mencapai tujuan dari penelitian.

Untuk lebih meningkatkan validitas data penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yang artinya menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu

Dalam Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan ini penulis akan menjelaskan dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Ia mengatakan bahwa ada enam hal yang mampu mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, serta Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Adapun penjelasan indikator-indikator dari teori tersebut yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan atau program yang akan di implementasikan tentunya memiliki ukuran dan tujuan yang jelas. Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki kaitan erat dengan para pelaksana (*implementors*). Implementasi yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya mengetahui mengenai apa yang menjadi ukuran dan tujuan suatu kebijakan. Dengan demikian indikator ini akan melihat sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Untuk itu, penulis akan menganalisa salah satu indikator yaitu ukuran dan tujuan dari Program Pengembangan Listrik Pedesaan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, dengan

melakukan wawancara sebagai berikut :

“Tujuan dari program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa listrik itu sangat dibutuhkan di pedesaan, target pertama kita adalah gimana masyarakat itu terpenuhi listrik di pedesaan, jadi udah jelas disana kami adalah menerangi listrik pedesaan atau menerangi masyarakat yang belum mempunyai listrik di pedesaan”. (**Wawancara dengan Ahmad Begab, S.Sos. M.Si, Kepala Seksi Usaha Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, 17 Oktober 2016**)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa tujuan program pengembangan listrik pedesaan pada intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik pada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Terkait mengenai tujuan atau sasaran program, peneliti melihat sampai saat ini masih banyak masyarakat pedesaan yang belum merasakan dampak (*impact*) dari program tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada paparan wawancara berikut ini :

“Belum merasakan dampaknya, karenakan listrik PLN itu belum masuk, disini kami pakai PILD nak, biayanya mahal, enggak sanggup bayar perbulannya. beginilah keadaan kami, gelap, anak-anak kalau belajar pake lampu teplok”. (**Wawancara dengan Ibu Tiasmin, Masyarakat yang tidak menerima Program Pengembangan Listrik**)

Pedesaan di Desa Serombou Indah, 19 Oktober 2016)

Dari beberapa kutipan wawancara yang peneliti lakukan diatas dapat dilihat bahwa Program Pengembangan Listrik Pedesaan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi sudah berjalan, namun tujuan ataupun sasaran dari program tersebut belum sepenuhnya tercapai, masih banyak masyarakat pedesaan yang belum mendapatkan penerangan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga apapun pekerjaannya, bagaimanapun situasinya dapat terselesaikan dengan baik. Selain sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Waktu merupakan bagian penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena dengan adanya kejelasan waktu dalam suatu kegiatan, maka implementor akan mengetahui apakah program tersebut sudah melewati batas pelaksanaan atau masih berada pada level pelaksanaan.

Dalam Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal, namun saat ini sumberdaya anggaranlah yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan

program tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada paparan wawancara dibawah ini :

“Kabupaten Rokan Hulu untuk saat ini mengalami keterbatasan dana anggaran itu sendiri, karena kita mengingat listrik pedesaan itu kapasitas jaringannya untuk 1 kilo meter memerlukan dana ± 600,000,000 juta. Kalau seandainya kita punya dana dikasih 3 M berapa kilo meter lah cuma dapat. Dana itu memang sangat dibutuhkan sekali”. (Wawancara dengan Ahmad Begab, S.Sos. M.Si, Kepala Seksi Usaha Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, 17 Oktober 2016)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa implementasi dalam Program Pengembangan Listrik Pedesaan memiliki permasalahan dalam bentuk anggaran. Anggaran yang diperoleh tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum menikmati penerangan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Setiap individu memiliki sifat atau karakter yang berbeda dalam menangani masalah publik (*Publik Problem*). Untuk itu dalam melakukan suatu kegiatan atau implementasi program dianjurkan untuk melihat karakteristik dari agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam keberhasilan suatu implementasi, seperti yang dinyatakan oleh Van

Metter dan Van Horn dalam Winarno (2002: 120) yaitu dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang

Untuk melihat apakah implementor dalam program listrik pedesaan memiliki karakteristik yang sesuai dengan bidang atau keahliannya maka peneliti pun melakukan wawancara dengan beberapa informan, berikut adalah paparan wawancara penelitian :

“kami rasa sudah sesuai lahkan dengan bidangnya kan pertambangan dan energikan memang untuk itu”.
(Wawancara dengan Bapak Dasril, Sekdes yang menerima program listrik pedesaan tepatnya di Desa Surau Tinggi, 19 Oktober 2016)

Berbeda halnya dari tanggapan diatas, masyarakat yang tidak merasakan dampak (*impact*) dari program pengembangan listrik pedesaan tepatnya di Desa Serombou Indah juga memberikan argumentasinya. Berikut adalah paparan wawancara yang penelitian :

“Kurang ahlilah, karena dari dulu sampai sekarang Desa kami ini belum teraliri listrik, dan pemerintah belum mampu untuk mengatasi permasalahan ini”. **(Wawancara dengan Ibu**

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Winarno (2002:121) mengatakan bahwa ada

mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Tiasmin, Masyarakat yang tidak menerima Program Pengembangan Listrik Pedesaan di Desa Serombou Indah, 19 Oktober 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang sudah menerima program pengembangan listrik pedesaan menilai Implementor dari program ini sudah bekerja dengan baik dan mereka sudah merasakan kehadiran program listrik tersebut. Namun disisi lain bagi yang belum merasakan kehadiran listrik menilai bahwa implementornya kurang berkompeten karena kebutuhan listrik dari dulu hingga saat ini belum bisa terselesaikan. Selain itu jika dilihat dari latar belakang pendidikan orang-orang yang bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi banyak yang menyandang status honorer dan lulusan sekolah menengah, kondisi ini menjadi sesuatu yang rumit karena untuk menyelesaikan masalah publik (*publik problem*) dalam skala besar, dibutuhkan seseorang yang memiliki karakteristik dan skill yang sesuai dengan bidangnya.

tiga unsur pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

- a. Pemahaman
Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dari kebijakan

sangatlah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran pelaksana terhadap kebijakan secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan implementasi sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan.

- b. Respon implementor terhadap kebijakan
Arah kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal mengimplementasikan kebijakan karena menolak tujuan yang terkandung dalam kebijakan dan sebaliknya. Apabila mereka menerima tujuan kebijakan maka implementasi akan berhasil
- c. Intensitas tanggapan
Intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi pencapaian kebijakan. Para pelaksana mempunyai pilihan negatif yang secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan bawahan yang menolak untuk

berperan serta dalam program tersebut

Berikut adalah hasil wawancara dengan informan penelitian :

“kami sebagai implementor hanya melaksanakan kebijakan pimpinan, selama ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan pimpinan itu adalah untuk masyarakat semua, kebijakan untuk kemajuan masyarakat, untuk kenyamanan masyarakat, bagaimana masyarakat kita itu bisa mendapatkan penerangan yang lebih layak”. (Wawancara dengan Ahmad Begab, S.Sos. M.Si, Kepala Seksi Usaha Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, 17 Oktober 2016)

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi antara anggota dalam suatu organisasi dan agar tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Dalam melakukan pengimplementasian program hal utama yang diperlukan adalah komunikasi, baik itu komunikasi antara individu maupun kelompok. Sebuah komunikasi bertujuan untuk menyatukan seluruh aspek demi tercapainya tujuan dalam berorganisasi. Pada intinya, tanpa adanya sebuah komunikasi yang baik maka sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Komunikasi memegang peranan penting bagi

berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan.

Disamping itu dalam pengimplementasian sebuah program diperlukan koordinasi dari pihak-pihak yang terkait atau koordinasi antar instansi-instansi, hal itu dilakukan demi keberhasilan suatu program. Komunikasi antar organisasi merupakan suatu prinsip yang kompleks karena sulit untuk meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi maupun dari organisasi satu ke organisasi lainnya. Disamping itu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa komunikasi didalam maupun diluar organisasi dalam pengimplementasian program listrik pedesaan terjalin dengan baik. Berikut adalah paparan wawancara peneliti dengan informan :

“Kita koordinasi sampai saat ini masih baik, kenapa saya katakan masih baik, karena antara pihak pemda, ESDM Pemda, Dinas Pertambangan Energi Pemda dengan PLN Rayon Pasir Pangaraian dengan area pekanbaru, dengan wilayah pekanbaru kita terjalin komunikasi”. (Wawancara dengan Ahmad Begab, S. Sos. M.Si, Kepala Seksi Usaha Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, 17 Oktober 2016)

Program listrik pedesaan ini juga mendapatkan respon yang positif berikut adalah paparan wawancara penelitian :

“Kami sangat mendukung pemerintah untuk keberhasilan program ini, masyarakatpun akan rela jika pemasangan tiang-tiang listrik diletakkan di

perkebunan mereka atau didepan rumah mereka mengingat ya memang listrik sangat dibutuhkan”. (Wawancara dengan Bapak Armizi Candra, Sekdes di Desa Serombou Indah yang tidak menerima listrik, 19 Oktober 2016)

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menganalisa bahwa komunikasi dalam pengimplementasian program listrik pedesaan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan organisasi dalam dan luar daerah terjalin dengan baik. Disamping itu masyarakat juga sangat mendukung program listrik pedesaan dan akan ikut berpartisipasi dalam keberhasilan program listrik tersebut dengan cara, memberikan kemudahan kepada implementor dalam pemasangan tiang dan jaringan listrik, contohnya dengan tidak meminta ganti rugi lahan. Tindakan tersebut juga akan sangat membantu implementor karena jika masyarakat meminta ganti rugi lahan maka proses pengimplementasian program akan terkendala, hal ini dilakukan masyarakat agar mereka semua bisa mendapatkan penerangan yang layak dan semata-mata untuk kepentingan bersama.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna mencapai keberhasilan suatu implementasi yaitu Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam suatu kebijakan. Dalam variabel ini yang paling dominan adalah pengaruh politik setempat. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan salah

satu informan penelitian, berikut paparan wawancara yang penulis lakukan :

“Sebetulnya suasana politik itu zaman sekarang boleh dikatakan ikut mempengaruhi, kenapa ikut mempengaruhi karena pimpinan yang sudah dipilih mempunyai wilayah atau mempunyai janji-janji politik semalam, dia mempunyai janji politik, apabila nanti saya terpilih disini akan saya bangun jaringan disini, itu sangat mempengaruhi”. (Wawancara dengan Ahmad Begab, S.Sos. M.Si, Kepala Seksi Usaha Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, 17 Oktober 2016)

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu

1. Keterbatasan Anggaran Pemda

Anggaran menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengimplementasian kegiatan listrik pedesaan, apabila suatu program sudah dirancang dengan sebaik mungkin, namun anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka akan sulit bagi implementor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah paparan wawancara peneliti dengan informan terkait mengenai anggaran :

“Salah satu rintangan kami ini adalah berkurangnya dana alokasi umum dari pemerintah pusat, berkurangnya dana tersebutlah

Hal senada juga disampaikan oleh Staf Ketenagalistrikan :

“Tetap mempengaruhi, sedikit banyaknya ada, tapi kami tidak bisa terlalu lebar menceritakan masalah itu”. (Wawancara dengan Bapak Sahrial, Staf Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, 17 Oktober 2016)

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa dalam proses Pengimplementasian Program Listrik Pedesaan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh lingkungan politik.

mengakibatkan terkendalanya kegiatan dilapangan, untuk Rokan Hulu hampir 182 M yang dipangkas dananya, kalau dipangkas yang 182 M itu dampaknya ke kegiatan, tidak bisa dilaksanakan, karena salah satu sumber dana untuk membayar kegiatan listrik dari situ, itulah kendala kita”. (Wawancara dengan Ahmad Begab, S.Sos. M.Si, Kepala Seksi Usaha Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, 17 Oktober 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala implementor dalam pengimplementasian program listrik pedesaan disebabkan berkurangnya dana dari pemerintah pusat.

2. Kurangnya Inovasi dalam Memanfaatkan Potensi Energi

Menurut Suryana (2006:45) mengatakan bahwa inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreatifitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang (*Doing New Thing*). Inovasi dapat dikatakan juga suatu perubahan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Pengembangan Listrik Pedesaan Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan yang belum sepenuhnya tercapai, dan sumberdaya finansial yang ada sangat terbatas untuk pengimplementasian program, kemudian karakteristik agen pelaksana sebagian kecil belum memiliki keahlian sesuai. Selain dari itu adapula yang sudah mulai menunjukkan peningkatan diantaranya sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana sudah menunjukkan respon positif terhadap kebijakan dan komunikasi antarorganisasi pelaksana sudah terjalin dengan baik serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam

yang menuju kearah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan.

pengimplementasian program sudah cukup mendukung. Uraian diatas menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian program tersebut dibutuhkan pembenahan pada masa mendatang agar mampu mencapai hasil yang maksimal.

2. Dari hasil penelitian juga ditemukan faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu keterbatasan anggaran pemda dan kurangnya inovasi dalam memanfaatkan potensi energi. Keterbatasan anggaran pemda menjadi faktor utama lambatnya proses pelaksanaan program pengembangan listrik pedesaan, karena jika tidak ada anggaran maka implementor tidak akan bisa melaksanakan program yang ada, dan kurangnya inovasi dalam memanfaatkan potensi energi menjadi faktor kedua yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, karena jika implementor kurang dalam berinovasi atau berkreatifitas maka keberhasilan program akan semakin lama.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program pengembangan listrik pedesaan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, penulis memberikan saran agar implementor dapat meningkatkan Rasio Elektrifikasi Kelistrikan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun saran atau masukan yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

- a) Diharapkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup karena program tersebut merupakan program dalam skala besar.

Kemudian implementor harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran serta tidak terpaku pada satu sumber dana, melainkan mencari sumber-sumber dana lainnya yang lebih luas.

- b) Diharapkan implementor mampu memanfaatkan potensi energi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu contohnya air, matahari, angin, dan lainnya, serta implementor harus melakukan berbagai cara agar tujuan dari program dapat tercapai dan masyarakat mendapatkan penerangan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Jones, Charles O. 2012. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lester, James P. Dan Joseph Stewart Jr. 2000. *Publik*

Policy: An Evolution Ary Approach, Belmont: Wadsworth

- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu.